

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dani Nur Saputra, dkk. 2022. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama. Palu: Feniks Muda Sejahtera.
- Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Alumni. Bandung.
- Kamal Hidayat. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Kadarudin. 2021. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2012. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Sidik Priadana dan Denok Sunarsi. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama, Tangerang: Pascal Books.
- Mardani. 2024. *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi. 2011. *Hukum waris dengan adanya surat wasiat*. Semarang; Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Nandang Sutisna. 2024. *Politik Hukum Pengadaan Barang/Jasa*. Indramayu: PT. Adab Indonesia.
- Nur Basuki Winarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Oksidelfa Yanto. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Padma D. Liman. 2016. *Hukum Waris: Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestato Menurut Burgelijk Wetboek (BW)*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Philipus M. Hadjon. 1998. *Tentang Wewenang Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Salim H.S. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta; Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung; Remaja Karya.

Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakkan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

#### **Perundang-undangan:**

*Burgelijk Wetboek (BW)*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan

#### **Jurnal:**

Alamsyah, dan Ikhsan, M. 2024. *Pemikiran dan Kritik terhadap Teori Hukum Murni Hans Kelsen*. Jurnal Dimensi Hukum Volume 8 No. 11.

Abdul Anwar Sanaki, Djohermansyah Djohan, Sampara Lukman, *Revitalisasi Peran Perangkat Kewilayahan Melalui Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Fakfak Kepada Kepala Distrik Fakfak*, Jurnal Kajian Pemerintah (JKP), Vol.9 Nomor 2, hlm. 63

Abdul Rauf Alauddin Said. 2015. *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4.

Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Dalam Jurnal Pro Justisia. Edisi IV. Universitas Parahyangan. Bandung.

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2023. *Relevansi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dan Pengampu Pengawas*. Jurnal Hukum Justice Volume 1 Nomor 1. Universitas Katolik Santo Thomas. Medan.
- Enrico Parulian Simanjuntak. 2018. *Pengujian ada Tidaknya Penyalagunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 7. No. 2. Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha MA-RI. Jakarta.
- I Ketut Widyantara Putra, Nyoman Satyayudha Dananjaya. 2024. *Pengurusan Warisan Atas Onbeeherde Nalatenschap Oleh Lembaga Balai Harta Peninggalan Bersama Notaris/PPAT*, Jurnal Kertha Patrika, Volume 46 Nomor 1.
- Imaniar Putri Novianti. 2015. *Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus*. Jurnal Pandecta Volume 10 Nomor 1. Semarang.
- Junaidi. 2021. *Sinergi Hukum dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial, Supremasi Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum Vol. 30. No. 1. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Solo.
- Jemmy Jefry Pietersz. 2017. *Prinsip Good Governance dalam penyalahgunaan wewenang*. SASI. Vol. 23 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Maluku.
- Michelle Hadlen, Roswita Sitompul, dan Kartina Pakpahan. 2023. *Realisasi Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Melepaskan Hak Waris Secara Paksa*. Sibatik Journal Volume 2 No.8. Universitas Prima Indonesia.
- Mohd. Yusuf DM, et al.. 2025. *Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman*. Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 13 No. 2.
- Muhammad Zulvikhar Kadir, Istiqamah. 2022. *Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Pendaftaran Dan Pembukaan Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)*. Alauddin Law Development Journal (ALDEV). Volume 4 Nomor 3.
- Mustafa Afifi, Shabrina Zata Amni, dan Mufti Maulana. 2023. *Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman*. Peradaban Journal Law and Society/ Volume 7 Nomor 2.
- Oemar Moechthar. 2017. *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek*. Jurnal YURIDIKA. Volume 32 Nomor 2.
- Quthub Al Faruqi, Zaitunah Subhan, Abdul Qodir. 2019. *Eksistensi dan Kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menurut*

*Perpres Nomor 59 Tahun 2015 Tentang KPPPA Dalam Urgensi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia*,. Journal of Legal research. Vol. 1 No. 1, Jakarta.

Rafly Rilandi Puasa, et.al. 2018. *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*. Eksekutif. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol. 1, No. 1, Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Rodiyah. 2015. *Antara Normatif dan Empirik: Pembentukan Hukum Sumber Daya Alam Indonesia (Perspektif Legal Sistem: Substansi Hukum)*. Law Research Review Quarterly, Vol 1. No.3, Universitas Negeri Semarang.

Shabrina Rizkiyani, Saeful Mujab. 2024. *Kekuasaan dan Wewenang dalam Perspektif Sistem Pemerintahan*. Konsensus: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. Volume 1 Nomor 4. Universitas Bhayangkara Jakarta.

Setiawan. M.R., Fakhry, M. & Apriano, M. 2021. *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH).

Seno Aji. 2024. *Efektivitas Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Kota Baru*. Tesis: Universitas Islam Sultan Agung.

Simatupang. 2020. *Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia (Lintas Sejarah Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional)*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE.

Striveen Doorson, et. Al. 2024. *Analisis Yuridis tentang Wewenang Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Publik*. Al-Zany, Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol. 2 No. 2. Universitas Pakuan Bogor.

Taufik H. Simatupang. 2018. *Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia*. De Jure, Volume. 18 Nomor.3. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Yayu Palayukan. Olga A. Pangkereggo. Butje Tampi. 2021. *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Lex Privantum Vol. 9 Nomor 4. Universitas Sam Ratulangi.

#### **Website:**

<https://ahu.go.id/bhp/layananOnbeheerdeNalatenschap>

<https://kumparan.com/erni-wati-1698320817873355980/onbeheerde-nalatanschap-harta-peninggalan-yang-tidak-terurus-23XgQ8uBEk1>